

Judul : Kasus kekerasan di kampus perlu mendapat perhatian serius
Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kasus Kekerasan Di Kampus Perlu Mendapat Perhatian Serius

Kasus pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), akibat dugaan pelecehan seksual mendapat perhatian serius. Salah satunya dari anggota Komisi X DPR dan pemerhati pendidikan.

Kasus pengeroyokan oleh 30 rekannya ini terjadi di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah. Sang korban yang bernama Arrendo (20 tahun), merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Undip.

Kejadian pengeroyokan itu terjadi pada Sabtu (15/11/2026) pukul 23.00 WIB hingga Minggu (16/11/2026) subuh. Namun, insiden itu baru viral awal bulan Maret ini, akibat pengeroyokan, korban mengalami luka parah.

Orang tua korban, Bagus (50 tahun) menjelaskan, anaknya sempat menjalani perawatan di RS Banyumank kemudian dipindah ke RS Bina Kasih Ambarawa Kabupaten Semarang.

"Sebetulnya dirujuk lagi ke RS Ken Saras untuk operasi hidung, tapi karena ketiadaan biaya, belum bisa dilaksanakan," kata Bagus (50), Kamis (5/3/2026).

Bagus mengatakan, setelah kejadian tersebut, anaknya tak lagi berangkat kuliah. Alasannya, selain kondisi kesehatan yang belum pulih, para pelaku pengeroyokan juga masih bebas berkeliaran sehingga anaknya takut kalau bertemu di lingkungan kampus.

Sementara itu, Arrendo pernah dilaporkan ke pihak kampus atas

dugaan pelecehan. Dia dilaporkan oleh tiga mahasiswi sebelum adanya aksi pengeroyokan tersebut.

Dilansir detikJateng, Kamis (5/3/2026), Direktur Direktorat Jejaring Media, Komunitas, dan Komunikasi Publik Undip Nurul Hasfi mengatakan, Arrendo telah dilaporkan tiga mahasiswi ke Dekanat.

"Ya kami menerima laporan dari pihak dekanat, bahwa yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual terhadap tiga mahasiswi," kata Nurul.

Menyikapi kasus ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati berpendapat, kasus ini harus menjadi momentum untuk kembali mengaktifkan dan memperkuat

dua instrumen penting pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Antara lain dengan Kampanye Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PKPT) serta peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

"Kampus seharusnya memiliki mekanisme yang jelas agar setiap laporan kekerasan dapat diproses secara adil tanpa memicu tindakan main hakim sendiri," ujar Kurniasih, Selasa (10/3/2026).

Sedangkan, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kabid Litbang) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Feriansyah mengatakan,

Pemerintah maupun pihak kampus harus lakukan pencegahan kekerasan yang bukan sekadar bersifat administratif dan formalitas.

Menurut dia, kampus harus mampu membangun satu budaya yang demokratis dengan dialog yang setara, egaliter serta memastikan sistem pelaporan dan transparansi yang melindungi korban.

"Segala laporan, baik itu kekerasan verbal, fisik atau seksual, harus ditangani secara cepat dan melindungi pelapor," ungkap Feriansyah, Rabu (11/3/2026).

Untuk mengetahui pandangan dari Kurniasih Mufidayati dan Feriansyah mengenai aksi kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, berikut wawancaranya.

KURNIASIH MUFIDAYATI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Satgas PPKS Kampus Harus Diperkuat



FOTO: ISTOCK/AMRINDO

Bagaimana Anda melihat kasus pengeroyokan mahasiswa oleh 30 rekannya?

Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya memastikan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus berjalan efektif. Seharusnya, kampus memiliki mekanisme yang jelas agar setiap laporan kekerasan dapat diproses secara adil tanpa memicu tindakan main hakim sendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan kekerasan di kampus harus benar-benar diaktifkan.

Pencegahannya seperti apa?
Kampanye nasional pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi harus terus diperkuat agar mahasiswa memahami mekanisme pelaporan dan penyelesaian kasus secara benar.

Selain itu, apalagi?
Perlu juga mengaktifkan peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap perguruan tinggi. Satgas ini harus menjadi garda

depan dalam menerima laporan, memberikan pendampingan kepada korban, serta memastikan proses penanganan berjalan secara objektif dan transparan.

Selama ini apa sudah berjalan?
Satgas PPKS tidak boleh hanya menjadi struktur administratif. Satgas harus aktif, responsif, mudah diakses mahasiswa, dan mampu memberikan rasa aman bagi korban untuk melapor. Ke depan kita berharap kampanye nasional PKPT dan keberadaan Satgas PPKS tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi sistem perlindungan yang mencegah kekerasan seksual maupun kekerasan fisik di lingkungan perguruan tinggi.

Anda yakin dengan dua langkah ini, kekerasan di lingkungan kampus bisa dihindari?

Tentu, kekerasan sistem yang kuat sangat penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan baru di lingkungan kampus. Ketika mahasiswa tidak percaya pada mekanisme institusi, yang sudah ada benar-benar berjalan di lapangan. ■ **NMN**

“

Kampanye pencegahan kekerasan juga harus diperkuat melalui edukasi kepada mahasiswa mengenai etika pergaulan, relasi yang sehat, serta cara menyikapi konflik secara dewasa.

main hakim sendiri akan semakin besar.

Sebagai langkah pencegahan, apalagi yang harus dilakukan perguruan tinggi?

Kampanye pencegahan kekerasan juga harus diperkuat melalui edukasi kepada mahasiswa mengenai etika pergaulan, relasi yang sehat, serta cara menyikapi konflik secara dewasa. Kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh mahasiswa.

Dengan adanya dugaan kekerasan seksual, bagaimana Anda melihatnya?

Dugaan kekerasan seksual harus ditangani secara serius dan berpihak pada korban, tetapi pada saat yang sama tidak boleh muncul kekerasan lain sebagai bentuk pelampiasan. Untuk itu, saya mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi bersama perguruan tinggi untuk terus menegakkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di kampus agar mekanisme yang sudah ada benar-benar berjalan di lapangan. ■ **NMN**

FERIANSYAH, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G

Kampus Harus Aktif, Tidak Tutupi Kasus



FOTO: ISTOCK/AMRINDO

Bagaimana Anda melihat aksi pengeroyokan kepada mahasiswa oleh 30 rekannya?

Ada akar kekerasan yang menunjukkan adanya suatu krisis, ada pembatasan kebebasan. Sehingga merecuk status quo terjadinya relasi kuasa yang tidak setara seperti fenomena senioritas, patriarki atau otoriter akademik. Sehingga harus bisa dilihat bahwa kekerasan yang terjadi di kampus itu bukan sekadar masalah insiden saja. Namun harus dilihat lebih luas bahwa ini masalah struktural dan kultural. Ini harus diubah dengan pendekatan lebih komprehensif.

Sebenarnya, bagaimana langkah perguruan tinggi dalam mencegah aksi kekerasan?
Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan namun bukan sekadar bersifat administratif dan formalitas. Tapi pendekatan yang masuk ke dalam proses pembelajaran. Kampus harus mampu membangun satu budaya yang demokratis dengan

dialog yang setara dan egaliter. Serta memastikan sistem pelaporan dan transparansi yang melindungi korban. Segala laporan, baik itu kekerasan verbal, fisik atau seksual, harus ditangani secara cepat dan dilindungi pelapor.

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, kasus kekerasan di kampus ini harus menjadi momentum untuk kembali mengaktifkan dan memperkuat Kampanye Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PKPT) serta peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Apa ada tanggapan?

Sebenarnya kita harus aprestasi sebagai langkah penting. Karena ini menunjukkan dari institusi untuk melindungi civitas akademik. Namun kita harus melihat efektivitas ini bergantung pada bagaimana Satgas ini berjalan secara independen, kapasitas dan keberanian dalam menangan

kasus dan melindungi korban. Jika hanya bersifat formal dan administratif, ini akan menjadi simbolis saja tanpa adanya perubahan yang nyata.

Bagaimana Anda melihat pelaksanaan PKPT dan Satgas PPKS di kampus-kampus? Apakah terlaksana dengan baik?

Seharusnya belum secara merata ya. Ini harus dilihat dan menjadi SOP pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang sudah baik ini.

Kendala selama ini apa saja? Masih minimnya pemahaman dari civitas akademik, kurangnya sumber daya dengan beban kerja tim dosen yang cukup besar. Namun juga dibutuhkan lingkungan kerja yang profesional. Bukan sekadar melindungi civitas akademik. Namun kita harus melihat efektivitas ini bergantung pada bagaimana Satgas ini berjalan secara independen, kapasitas dan keberanian dalam menangan

kasus dan melindungi korban. Jika hanya bersifat formal dan administratif, ini akan menjadi simbolis saja tanpa adanya perubahan yang nyata.

Bagaimana Anda melihat pelaksanaan PKPT dan Satgas PPKS di kampus-kampus? Apakah terlaksana dengan baik?

Seharusnya belum secara merata ya. Ini harus dilihat dan menjadi SOP pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang sudah baik ini.

Kendala selama ini apa saja? Masih minimnya pemahaman dari civitas akademik, kurangnya sumber daya dengan beban kerja tim dosen yang cukup besar. Namun juga dibutuhkan lingkungan kerja yang profesional. Bukan sekadar melindungi civitas akademik. Namun kita harus melihat efektivitas ini bergantung pada bagaimana Satgas ini berjalan secara independen, kapasitas dan keberanian dalam menangan

kasus, namun bagaimana juga secara pro aktif berpihak kepada korban. Karena perlindungan kepada korban bisa membangun reputasi. ■ **NMN**